

MENELUSURI KEGAGALAN PENDIDIKAN BUDI PEKERTI

Oleh Suwarna

Menyongsong pelaksanaan KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) tahun 2004, pendidikan budi pekerti kembali menyeruak. Pendidikan budi pekerti menjadi bagian roh dari KBK dengan prinsip pembelajaran terpadu (*integrated learning*). Marilah kita sedikit menengok ke belakang untuk menatap ke depan pendidikan budi pekerti dengan langkah tepat dan strategis.

Problem budi pekerti sebetulnya problem global yang dihadapi semua bangsa, bukan hanya Indonesia. Hasil statistik di Amerika Serikat berdasarkan survei *Children Defense Fund* (Suyanto, 2001) menunjukkan bahwa **setiap hari** di AS terdapat 3 remaja di bawah umur 25 tahun meninggal karena AIDS, 6 anak bunuh diri, 342 anak melakukan tindak kekerasan, 1.407 bayi lahir dari anak belasan tahun di luar nikah, 2.833 anak putus sekolah, 6.042 anak ditahan kerana tindak kriminal, 135.000 anak ketahuan membawa senjata api. Di Indonesia sebagian dari gejala itu dapat disimak dalam berita kriminal, baik media elektronik dengan berbagai nama seperti Fokus, Lacak, Derap Hukum, Buser, dan sebagainya, dan media cetak. Tentu kita tidak menginginkan generasi kita mendatang rusak moral budi pekertinya karena nenek moyang kita terkenal bangsa yang ramah dan berbudi.

Pendidikan budi pekerti secara logika struktural telah dicanangkan sejak tahun 1994 dengan pendidikan budi pekerti secara integratif dengan mata pelajaran (*integrated learning*). Hal itu sebagai realisasi tuntutan dan reaksi publik atas penghilangan pendidikan budi pekerti pada tahun 1970-an. Akibat penghilangan itu dampaknya baru terasa kurang lebih 20 berikutnya, antara lain berbagai kasus KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Tahun 2000 pendidikan budi pekerti kembali mencuat ketika dilaksanakan suplemen kurikulum. Tahun 2000 Dikdasmen Jakarta menerbitkan buku I dan II yang berisi Pendidikan Budi Pekerti dan disusul tahun 2002 Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas Jakarta juga menerbitkan seri Pendidikan Budi Pekerti untuk tingkat SD hingga SLTA yang termuat dalam salah satu seri Kurikulum Berbasis Kompetensi. Sayang buku-buku tersebut tidak menyajikan cara pembelajaran yang strategis guna mencapai tujuan pendidikan budi pekerti. Alhasil, hingga kini belum tampak tanda-tanda keberhasilan pendidikan budi pekerti. Buktinya, masih banyak perilaku menyimpang dari norma, betapa memilukan jika kita meresepsi berita kriminal dari media, baik cetak maupun elektronik. Akankah pengalaman 'kegagalan' pendidikan budi pekerti dari tahun 1994-2002 menjadi lagu wajib yang memilukan? Dimanakah letak kebuntuan saluran pendidikan budi pekerti itu?

Saluran Pendidikan Budi Pekerti

Secara formal, minimal ada empat saluran yang dapat menyumbat sirkulasi pendidikan budi pekerti sehingga tidak sampai ke anak didik. *Pertama, pengembang kurikulum*. Kurikulum ini merupakan pangkal tolak utama penyemaian pendidikan budi pekerti. Pengembang kurikulum adalah insan penerjemah yang mampu menganalisis dan menerjemahkan kebutuhan (*need analysis* atau *assesment analysis*) termasuk pendidikan budi pekerti. Sebenarnya para pengembang kurikulum pasti mengetahui apa yang dikehendaki kebijakan pendidikan dalam bidang budi pekerti. Saluran berikutnya, walaupun mereka mengetahui, mampukah atau sempatlah mereka mengintegrasikan pendidikan budi pekerti dalam setiap bidang mata pelajaran. Perlu disadari bahwa tidak mudah memasukkan atau mengintegrasikan pendidikan budi pekerti untuk mata pelajaran tertentu. Apalagi kurikulum sekarang ini mendasarkan pada kompetensi (KBK: Kurikulum Berbasis Kompetensi) dan masih dituntut mengintegrasikan pendidikan budi pekerti. Padahal mereka terus dikejar *deadline*.

Misalnya, mengintegrasikan pendidikan budi pekerti pada pelajaran kimia, fisika, matematika, tidaklah semudah mengintegrasikan pendidikan budi pekerti dalam mata pelajaran agama, PPKN, dan bahasa Jawa.

Hal itu akan lebih parah apabila diperburuk oleh pemenuhan target proyek. Pemikiran secara akademis dengan proyek memiliki perbedaan orientasi secara nyata. Secara akademis kurikulum hendaknya memuat pendidikan budi pekerti. Namun secara proyek, hal itu bukan merupakan bagian pemikiran secara urgen, yang penting pekerjaan selesai, dapat dipertanggungjawabkan, ada wujud SPJ (surat pertanggungjawaban) sesuai dengan kontrak. Selesai. Masalah akademis biarlah insan akademis yang memikirkan. Solusi dari polemik ini, hendaknya pengembang kurikulum melibatkan pakar yang berkompeten dalam bidang kurikulum, bidang studi, psikologi, pendidikan budi pekerti, bahkan perlu melibatkan guru dan MGMP dalam uji validitasnya.

Kedua, jika pengembang kurikulum sudah berhasil memuatkan budi pekerti secara integratif dalam kurikulum, saluran bermasalah kedua adalah *penulis buku*. Mampukah dan sempatkah penulis buku menerjemahkan kurikulum menjadi sebuah buku pelajaran yang bernuansa budi pekerti. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa para penulis buku memasang strategi gerilya untuk mendapatkan kurikulum terbaru. Bahkan memasang spionase dan radar agar segera dapat menangkap sinyal kurikulum baru. Iklim bisnis buku yang terjadi, ada kecenderungan buku yang berhasil di pasaran adalah buku yang muncul terlebih dahulu. Maka tidak heran apabila para penulis buku saling berkejaran untuk segera sampai pada finis penyelesaian buku, demi profit semata. Apalagi telah dikejar-kejar penerbit. Akibatnya secara akademis buku hanya menulis materi pelajaran, tanpa mempedulikan roh pendidikan budi pekerti yang harus disajikan integratif. Penulis tidak mampu atau mandul/tidak peka terhadap pendidikan yang tersirat dalam kurikulum. Kembali buku hanya menyajikan muatan bidang studi, kering dari pendidikan budi pekerti. Jika ini terjadi sudah dapat dipastikan bahwa lagu lama kegagalan pendidikan budi pekerti kembali mengumandang.

Ketiga, jika kurikulum dan buku sudah dibuat bagus bermuatan dan bernuansa pendidikan budi pekerti, saluran struktural selanjutnya adalah *guru*. Guru menjadi ujung tombak yang menyampaikan, menginternalisasikan pendidikan budi pekerti dalam diri anak didik. Pertanyaannya, seberapa besar guru memiliki daya peka terhadap pendidikan budi pekerti yang terintegrasi dengan buku pelajaran? Mampukan guru mengajarkan budi pekerti secara integratif dengan mata pelajaran? Sementara disadari atau tidak bahwa buku pelajaran bagi guru seperti “kitab suci”. Artinya guru hanya mengajarkan apa yang tersaji di dalam buku itu sendiri. Padahal pendidikan budi pekerti ada di balik materi yang disajikan itu. Tidak semua guru mampu dan mau mencurahkan pikiran untuk memikirkan dan menganalisis pendidikan budi pekerti yang ada di balik materi pelajaran (tersirat/implisit). Tingkat pengembangan bahan ajar pun rendah. Walhasil pembelajar tetap pintar dalam materi pelajaran, namun tetap tidak mengerti dan tidak mungkin terjadi proses internalisasi pendidikan budi pekerti. IQ (*intelligence quotient*/kecerdasan otak), tinggi namun EQ (*emotional quotient*/kecerdasan emotional dan SQ (*social quotient*/kecerdasan sosial) rendah. Alhasil seperti sekarang ini, kebijakan pendidikan budi pekerti sudah dipublikan dari tahun 1994 hingga sekarang, namun banyak perilaku yang berlawanan dengan pendidikan budi pekerti tetap saja merajalela. Dengan berprasangka baik, tentu banyak pula guru yang telah mengajarkan budi pekerti kepada anak didik sesuai dengan kemampuan penerjemahan/kepekaan mereka masing-masing terhadap buku yang dihadapi.

Keempat, saluran terakhir sebagai hilir dari semua saluran pendidikan budi pekerti yaitu *pembalajar*. Walaupun kurikulum, buku, dan guru telah menyajikan pendidikan budi pekerti, apabila pembelajar tidak mau menerima, pendidikan budi pekerti pasti gagal. Hal ini diperparah dengan kebijakan NEM waktu itu. Dengan hanya mengejar target nilai ebtanas murni, baik oleh sekolah, guru dan siswa, hingga seakan mendewakan IQ sedangkan EQ dan SQ dimarginalkan hingga mengalami stagnan perkembangan. Padahal EQ dan SQ merupakan sebagian roh pendidikan budi pekerti.

Sekarang ini banyak perilaku menyimpang yang dikemas lebih indah dan mempesona hingga meninabobokan para remaja. Padahal itu hanya kamoflase belaka, yang tidak selalu mendatangkan manfaat. Namun mereka menggandrunginya, seperti disco, narkoba, minuman keras, anarkhis, geng, ugal-ugalan, pemerkosaan, perkelahiran massal, sikap menentang atau membantah, sikap kurang hormat, dsb. Hal ini tidak bisa ditangisi, karena masa anak hingga remaja memang masa mencari jati diri (*learning to be*). Maka keberhasilan pendidikan budi pekerti sangat tergantung pula bagaimana menyajikan pendidikan budi pekerti yang sesuai dengan perkembangan siswa secara psikologis.

Eksplisit dan Terpadu

Agar pendidikan budi pekerti berhasil, penyajian pendidikan budi pekerti tidak lagi implisit seperti pada kurikulum dan buku-buku yang lalu. Roh pendidikan budi pekerti tidak lagi disajikan secara tersirat, tetapi tersurat, tidak lagi implisit, tetapi eksplisit. Dengan demikian guru langsung mengetahui secara eksplisit dan tersurat pendidikan budi pekerti yang terpadu dengan mata pelajaran tertentu. Ini sangat tepat untuk mengatasi kebanyakan guru yang hanya mengajarkan apa yang tertulis dalam buku pelajaran. Penyajian yang demikian memiliki kelebihan (1) menunjukkan bahwa pengembang kurikulum memahami hakikat pendidikan budi pekerti dan penyajiannya, (2) memberikan kemudahan para pembuat buku dan guru, (3) mempermudah pembelajarannya dan memperingan tugas guru. Guru tidak perlu lagi mengasah kepekaan untuk memahami pendidikan budi pekerti yang tersirat, (4) mempermudah penilaiannya sehingga lebih objektif walaupun pendidikan budi pekerti bersifat subjektif, (5) anak didik mendapatkan kejelasan budi pekerti yang harus dipelajari dan diinternalisasikan dalam dirinya.

Selain itu perlu pembelajaran tetap bersandar pada empat pilar pendidikan yang digariskan oleh UNESCO secara terpadu yaitu *learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together*. Dengan mengetahui pendidikan budi pekerti secara eksplisit, guru dan pembelajar lebih mudah dalam memahami materi pendidikan budi pekerti (*learning to know*). Setelah terjadi internalisasi (pemahaman diri terhadap budi pekerti), guru menciptakan kondisi yang menuntut para anak didik untuk melakukan dan mempraktikkan pendidikan budi pekerti (*learning to do*). Jadi kondisi itu sengaja diciptakan oleh guru. Maka guru perlu mengemas pendidikan budi pekerti dengan bentuk dan strategi yang menarik siswa sesuai dengan perkembangan jiwanya hingga mereka tidak mudah tergoda budaya maya yang tiada berguna. Dari sinilah awal jatidiri (*learning to be*) mulai terbentuk, yaitu jati diri dalam koridor budi pekerti. Biarkan mereka dengan caranya sendiri menggali pendidikan budi pekerti. Seorang ahli psikologi besar dari Swiss, Jean Piaget dalam bukunya *The Moral Judgment of The Child* menyatakan bahwa anak-anak memandang benar dan salah pendidikan moral/budi pekerti menurut caranya sendiri. Dengan demikian pendidikan dapat menciptakan manusia-manusia yang hidup bersanding dan bersaing dalam masyarakat yang berperilaku budi pekerti luhur (*live together*).

Drs. Suwarna Pringgawidagda, M.Pd.
Dosen UNY
Penulis dan Peneliti Pendidikan Budi Pekerti